

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pahlawan 102-108 Surabaya 60174 Telepon (031) 3554851- 57, Fax (031) 3534339

LAPORAN KETUA PANITIA

FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

Surabaya, 5 – 6 Pebruari 2018

Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua,

- Yth. Bpk. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur (Dr. Ir. Budi Setiawan, MMT);
- Yth. Bpk. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili;
- Yth. Para Kepala PD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili;
- Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur atau yang mewakili;
- Yth. Sdr. Para Pejabat di Lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur ;
- serta Pimpinan PT serta Hadirin undangan rapat yang berbahagia.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Rapat hari ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan penting terhadap RKPD Rancangan Awal yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, sehingga forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili pembahasan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana 2019.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan keterkaitan dalam dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sebagai yakni pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Provinsi Jawa Timur diharuskan mengacu pada dokumen RKP Nasional, yang selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2019.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.

2. Latar Belakang Rapat:

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD. Hal ini berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang bahwa Awal mengamanatkan Rancangan RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran kemudian akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

3. Maksud dan Tujuan Rapat:

Adapun maksud diselenggarakannya rapat ini adalah penyampaian program prioritas pembangunan beserta tema pembangunan Jawa Timur Tahun 2019 sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2019.

Secara umum, tujuan dari rapat ini adalah penyepakatan program/kegiatan prioritas hasil analisa permasalahan dan isu strategis yang kemudian akan dituangkan ke dalam penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

RKPD Rancangan Awal telah yang disempurnakan akan menjadi lampiran Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Pemerintah Lingkup Provinsi.

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RKPD didasarkan pada Surat Edaran tersebut dan hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda Provinsi.

Hasil verifikasi Renja PD dimaksud nantinya akan digunakan sebagai bahan perumusan Rancangan RKPD. Proses ini kemudian akan menghasilkan Rancangan RKPD yang menjadi bahan Musrenbang RKPD Provinsi.

Sebagai informasi awal, pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi akan dilaksanakan pada minggu ke dua Bulan April dan informasi terkait hal tersebut akan disampaikan melalui Surat Edaran Gubernur kepada seluruh Bupati/Walikota yang sekaligus akan dilampiri dengan Rancangan RKPD Provinsi sebagai acuan penyelarasan prioritas pembangunan Jawa Timur Tahun 2019 dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota.

4. Waktu, Tempat dan Peserta Rapat:

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ini dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, 5 – 6 Pebruari 2018 bertempat di Novotel Samator East Surabaya dan diikuti oleh kurang lebih 250 orang yang terdiri dari perwakilan unsur Stakeholder yang diundang, Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta internal Bappeda Provinsi Jawa Timur.

5. Panitia dan Narasumber:

Panitia Rapat berasal dari internal Bappeda Provinsi Jawa Timur sedangkan untuk Narasumber Rapat adalah Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Para Pejabat di Lingkungan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

6. Agenda Rapat:

- 1) Agenda utama rapat malam hari ini adalah : Rancangan Tema Pemaparan dan Rancangan Prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik oleh Kepala Bappeda Provinsi dan undangan yang mewakili masing-masing unsur yang nanti akan ditunjuk.
- 2) Selanjutnya rapat akan dilanjutkan besok yang dalam pelaksanaannya nanti akan dibagi menjadi dua tempat yang berbeda, dengan agenda utama sebagai berikut:

 Pertama:
 - a. Sosialisasi aplikasi e-Planning Musrenbang Kabupaten/Kota;
 - b. Penyepakatan jadwal pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota;yang akan diikuti oleh peserta dari Bappeda Kabupaten/Kota;

Kedua:

Sosialisasi aplikasi e-Planning Musrenbang Provinsi yang akan diikuti oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk berkenan memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus membuka acara ini dan kami atas nama panitia mohon maaf jika dalam penyelenggaraan rapat kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu sekalian.

Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. SIGIT PANOENTOEN, M.Si

Pembina Tk. I NIP.19660729 199703 1 001